

**TESIS**

**IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU  
(PKT) DALAM PEMBINAAN POTENSI KETERAMPILAN DAN  
KEMANDIRIAN BERUSAHA PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN  
SETIABUDI  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Disusun Oleh:

NAMA : DEWINA MARINI  
NPM : 1762002106  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH  
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH  
DOSEN PEMBIMBING : Dr. ASROPI, M.Si

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
guna memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik  
(M.Tr.A.P)**



**PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
2020**



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
(STIA – LAN) JAKARTA

**LEMBAR PERSETUJUAN  
TUGAS AKHIR**

*JUDUL TUGAS AKHIR* :

**IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU (PKT)  
DALAM PEMBINAAN POTENSI KETRAMPILAN DAN KEMADIRIAN  
BERUSAHA PADA MASYARAKAT  
DI KECAMATAN SETIABUDI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Jakarta, Desember 2019

Pembimbing,

  
( DR. ASROPL, M.Si )

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
(STIA – LAN) JAKARTA

### LEMBAR PENGESAHAN

Nama : DEWINA MARINI  
Nomor Pokok : 1762002106  
Program Studi/Konsentrasi : MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH  
Judul Tesis : Implementasi Pengembangan Kewirausahaan  
Terpadu (PKT) Dalam Pembinaan Potensi  
Ketrampilan Dan Kemandirian Berusaha Pada  
Masyarakat di Kecamatan Setiabudi Kota  
Administrasi Jakarta Selatan.

Telah mempertahankan Tugas Akhir ini dihadapan Tim Penguji  
Program Magister Ilmu Administrasi  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi  
Lembaga Administrasi Negara

Hari : Jumat  
Tanggal : 6 Desember 2019  
Pukul : 15.30 – 16.30 WIB

TELAH DINYATAKAN TELAH

Tim Penguji :  
Ketua : Dr. Edy Sutrisno, M.Si  
Sekretaris : Dr. R. Luki Karunia, MA  
Pembimbing / Anggota : Dr. Asropi, M,Si  
Anggota : Dr. Subandi. MM



Handwritten signatures of the examiners, including the names "Linda Tengan" and "Karunia".



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
(STIA – LAN) JAKARTA

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewina Marini  
NPM : 1762002106  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Daerah  
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Tugas Akhir yang telah saya buat ini dengan judul **IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU (PKT) DALAM PEMBINAAN POTENSI KETERAMPILAN DAN KEMANDIRIAN BERUSAHA PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SETIABUDI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN** merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, 3 Desember 2019

Penulis,



(Dewina Marini)

## KATA PENGANTAR

Pertama dan paling utama penyusun memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam Pembinaan Potensi Keterampilan dan Kemandirian Berusaha Pada Masyarakat di Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan”.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar magister di bidang Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) kampus Jakarta. Semoga Tesis ini berguna bagi para civitas akademis maupun para praktisi yang membutuhkan, sehingga pada gilirannya kandungan Tesis ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal baik yang tak terputus.

Terlaksananya penulisan Tesis ini tak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada Yth. Dr. Asropi, M.Si, yang telah membimbing penyusun dengan tulus dan penuh kesabaran atas berbagai kekurangan penyusun, baik secara teoritis maupun teknis pelaksanaan penelitian sampai terselesaikannya Tesis ini.

Pada kesempatan ini penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ketua STIA LAN JAKARTA Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos.,MA. beserta jajarannya, atas kesempatan yang diberikan kepada penyusun untuk menulis Tesis ini.
2. Para Dosen STIA LAN JAKARTA atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.
3. .... dst
4. Rekan-rekan mahasiswa Kampus STIA LAN Jakarta dan rekan kerja di kantor Kecamatan Setiabudi , yang senantiasa mengiringi langkah penyusun dengan doa, motivasi dan dukungan kepada penyusun dalam menyelesaikan studi dan Tesis ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan melipatgandakan pahala kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas dan pihak-pihak lainnya yang tidak disebutkan disini, amin.

Jakarta, ..... 2019

Penyusun

**DM**



**POLITEKNIK**  
**STIA LAN**  
**J A K A R T A**

## ABSTRAK

**Dewina Marini, 1762002106**

### **IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN TERPADU (PKT) DALAM PEMBINAAN POTENSI KETERAMPILAN DAN KEMANDIRIAN BERUSAHA PADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SETIABUDI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) adalah salah satu program unggulan yang menjadi salah satu janji Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada masa kampanye, dahulu dikenal dengan istilah *One Kecamatan One Corporate Entrepreneurship* atau yang lebih familiar dengan akronim OK OCE. Pada tataran praktisnya, masih terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan program ini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi., dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam pembinaan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pada masyarakat di Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam pembinaan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pada masyarakat di Kecamatan Setiabudi sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan aspek penelitian pencapaian tujuan, implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam pembinaan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pada masyarakat di Kecamatan Setiabudi telah memberikan manfaat dan dampak yang signifikan terhadap peserta, namun masih terdapat kekurangan yaitu belum adanya peserta yang dapat menyelesaikan tahapan program PKT, tidak adanya jadwal atau tenggat waktu yang jelas di setiap tahapan program PKT, rendahnya minat peserta untuk menyelesaikan seluruh tahapan program PKT. Sementara itu berdasarkan aspek yang lain, tingkat implementability dari implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam pembinaan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pada masyarakat di Kecamatan Setiabudi cukup baik, namun terdapat kekurangan yaitu tidak adanya struktur organisasi dan kelembagaan pada program PKT di Kecamatan Setiabudi, tidak adanya koordinasi dan pembagian tugas setiap SKPD yang terlibat, belum tercapainya target PKT, dan sumberdaya terutama SDM pendampingan wirausaha yang belum memadai. Adapun saran penelitian adalah membentuk struktur organisasi kelembagaan program PKT di Kecamatan Setiabudi, menentukan pembagian tugas dan fungsi serta pola koordinasi setiap SKPD yang terlibat, membuat jadwal yang jelas pada setiap tahapan program PKT mulai dari P1 sampai dengan P7, meningkatkan sosialisasi program PKT kepada masyarakat di Kecamatan Setiabudi.



## ABSTRACT

**Dewina Marini, 1762002106**

### **IMPLEMENTATION OF INTEGRATED ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT (PKT) IN THE DEVELOPMENT OF SKILLS AND INDEPENDENCE ON BUSINESS IN SETIABUDI DISTRICT SOUTH JAKARTA CITY**

*The Integrated Entrepreneurship Development Program (PKT) is one of the flagship programs that has become one of the promises of the Governor and Vice Governor elected during the campaign period, formerly known as One Kecamatan One Corporate Entrepreneurship or more familiar with the OK OCE acronym. At the practical level, there are still a number of problems during in the practice of this program.*

*This research is a descriptive study with a qualitative approach which is a method that emphasizes the aspect of in-depth understanding of a problem rather than looking at the problem for generalization research, with the aim of knowing the extent of the implementation of Integrated Entrepreneurship Development (PKT) in fostering the potential skills and independence of trying to community in Setiabudi District, South Jakarta City Administration.*

*The results of this study are that the implementation of Integrated Entrepreneurship Development (PKT) in fostering the potential of business skills and independence in the community in the Setiabudi District has been going well. Based on the research aspects of achieving goals, the implementation of Integrated Entrepreneurship Development (PKT) in fostering the potential of business skills and independence in the community in the District of Setiabudi has provided significant benefits and impacts on participants, but there are still shortcomings namely there are no participants who can complete the stages of the PKT program, there is no clear timetable or deadline at each stage of the CCP program, there is a lack of interest in participants to complete all stages of the CCP program. Meanwhile based on other aspects, the level of implementability of the Integrated Entrepreneurship Development (PKT) implementation in fostering the potential of business skills and independence in the Setiabudi District is quite good, but there is a drawback that is the lack of organizational and institutional structure in the PKT program in the Setiabudi District, not there is coordination and division of tasks for each SKPD involved, PKT targets have not been achieved, and inadequate human resources especially entrepreneurial assistance. The research suggestion is to establish the organizational structure of the PKT program in the Setiabudi District, determine the division of tasks and functions as well as the coordination pattern of each SKPD involved, make a clear schedule at each stage of the PKT program from P1 to P7, increase the socialization of the PKT program to the community at Setiabudi District.*



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>Viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I            PERMASALAHAN PENELITIAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Fokus Permasalahan.....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II          TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Teori dan Kebijakan.....	15
B. Penelitian Terdahulu.....	52
C. Konsep kunci.....	59
D. Model Berpikir.....	60

	E. Pertanyaan Penelitian.....	61
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	A. Metode Penelitian .....	63
	B. Teknik Pengumpulan Data.....	64
	a. Data Primer.....	64
	b. Data Sekunder.....	67
	C. Instrumen Penelitian.....	67
	a. Wawancara.....	68
	b. Telaah Dokumen .....	69
	D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	70
	1. Teknik Pengolahan .....	70
	2. Analisis Data .....	71
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Deskripsi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Kecamatan Setiabudi.....	72
	1. Deskripsi Singkat Wilayah Kecamatan Setiabudi.....	72
	2. Deskripsi Zonasi dan Tata Ruang Wilayah Kecamatan Setiabudi.....	74 77
	3. Deskripsi Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) Kecamatan Setiabudi.....	

B. Hasil dan Analisis Hasil Penelitian .....	84
1. Aspek Pencapaian Tujuan.....	84
a. Proses Sesuai Prosedur.....	84
b. Dampak dan Manfaat Terhadap Peserta.....	103
2. Aspek Tingkat Implementability .....	111
a. <i>Content of Policy</i> .....	111
b. <i>Context of Policy</i> .....	117

## **BAB V                    KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan.....	122
B. Saran.....	125

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

1. Matrix Pengembangan Instrumen
2. Pedoman Wawancara
3. Transkrip Pedoman Wawancara
4. Hasil Wawancara
5. Hasil Telaah Dokumen
6. Surat Penelitian Tesis Mahasiswa STIA LAN dari STIA LAN Jakarta
7. Surat Keterangan Selesai Penelitian
8. Daftar Riwayat Hidup
9. Foto Dokumentasi Penelitian



**POLITEKNIK**  
**STIA LAN**  
**J A K A R T A**

## DAFTAR SINGKATAN

1. BDT : Basis Data Terpadu
2. BUMN : Badan Usaha Milik Negara
3. DKI : Daerah Khusus Ibukota
4. IKM : Industri Kecil Menengah
5. IUMK : Izin Usaha Mikro Kecil
6. KASATPEL : Kepala Satuan Pelaksana
7. KTP : Kartu Tanda Penduduk
8. KUBE : Kelompok Usaha Bersama
9. KUKMP : Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Perdagangan
10. LOKSEM : Lokasi Sementara
11. OK OCE : *One Kecamatan One Corporate Entrepreneurship*
12. OL : *Organization Learning*
13. PERGUB : Peraturan Gubernur
14. PJLP : Penyedia Jasa Lainnya dan Perorangan
15. PKL : Pedagang Kaki Lima
16. PKT : Pengembangan Kewirausahaan Terpadu
17. PPAPP : Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Pengendalian Penduduk
18. PSN : Pemberantasan Sarang Nyamuk
19. PTSP : Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah

21. RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
22. RT : Rukun Tetangga
23. RW : Rukun Warga
24. SDM : Sumber Daya Manusia
25. SI : Strategi Implementasi
26. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
27. UEP : Usaha Ekonomi Produktif
28. UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1.	Peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2019 .....	10
2.	<i>Key Informant</i> .....	66
3.	Profil Kelurahan Wilayah Setiabudi .....	73
4.	Batas Wilayah Kecamatan Setiabudi .....	74
5.	Tujuan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu ..	79
6.	Jumlah Warga Pendaftaran PKT Kecamatan .....	86
7.	Data Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara Kecamatan Setiabudi .....	88
8.	Data Pelatihan PKT di Kecamatan Setiabudi .....	89
9.	Data Pendampingan Program PKT Kecamatan Setiabudi ..	91
10.	Kegiatan Pemasaran Program PKT di Kecamatan Setiabudi	96-97
11.	Penerima Bantuan Permodalan Program PKT Kecamatan Setiabudi .....	99
12.	Pencapaian Target Wirausaha yang Mendapatkan Perizinan IUMK/SKU Kota Administrasi Jakarta Selatan	108



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
1.	Kebijakan/Peraturan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) .....	7
2.	7 (Tujuh) Proses Pendampingan PKT .....	8
3.	Model Implementasi George C. Edward III .....	25
4.	Implementasi sebagai Proses Administrasi dan Politik .....	26
5.	Perencanaan Pembangunan di Daerah .....	51
6.	Model Penelitian .....	60
7.	Peta Zonasi dan Tata Ruang Wilayah Kecamatan Setiabudi	76

## **BAB I**

### **PERMASALAHAN PENELITIAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia memiliki berbagai tugas dan kewenangan sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang salah satu fungsinya sebagai penggerak roda perekonomian rakyat. Berbagai Sektor kegiatan seperti, industri perkantoran, perdagangan dan perumahan semakin mudah ditemui di Provinsi DKI Jakarta.

Sehubungan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah, serta perdagangan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menugaskan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (KUKMP) Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan pelayanan, pembinaan, perlindungan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah serta perdagangan di Ibu Kota Provinsi DKI Jakarta, termasuk mewujudkan salah satu misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta yaitu menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial. Percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang, serta upaya penanggulangan kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mendayagunakan potensi ekonomi kota Jakarta.

Dalam mewujudkan misi tersebut diatas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di 6 (enam) wilayah kota/kab, yang juga telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu sebagai dasar hukum penggantian program OK OCE berganti menjadi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang telah memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti program tersebut. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) adalah perubahan ataupun dari Program OK OCE yang merupakan salah satu program atau janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta terpilih Anies – Sandi Periode 2017 – 2022.

Program tersebut mengacu pada dasar hukum program – program pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang kewajiban daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta terpilih Anies – Sandi Periode 2018 – 2023 adalah “ Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”. Ada 5 (lima) misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Program OK OCE masuk dalam 2 (dua) misi yaitu pada misi ke 1 (satu) dan misi ke 2 (dua) yaitu :

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga yang memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan, dan memanusiakan.
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan, dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

Selain dari itu, Program OKE OCE adalah salah satu dari 3 (tiga) Program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang menjadi prioritas, dalam hal ini Program OK OCE terdapat pada prioritas program yang ke 2 (dua) yaitu fokus pada langkah-langkah awal dalam memenuhi program kerja prioritas dalam 3 bidang. Program OK OCE termasuk kedalam bidang pertama yaitu “Lapangan kerja, untuk menciptakan wirausahawan baru dan menciptakan lapangan kerja”.

Dalam menjalankan program pemerintahan, saat ini terdapat 23 (dua puluh tiga) janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Program OK OCE berada pada point ke 3 (tiga) yaitu “membuka 200.000 lapangan kerja baru, membangun dan mengaktifkan 44 pos pengembangan kewirausahaan warga untuk menghasilkan 200.000 pewirausaha baru, selama lima tahun. Program OK OCE adalah sebuah gerakan ekonomi kerakyatan berbasis teknologi informasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Berbasis kewirausahaan dengan konsep ekonomi berbagi (*sharing economy*) yang dijalankan dengan ekosistem yang melibatkan empat unsur yaitu masyarakat, komunitas, swasta dan pemerintah. Pelatihan Dasar OK OCE dilaksanakan di semua tingkat kecamatan se Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Bertemakan : “*One Kecamatan, One Centre For Entrepreneurship* Mikro – Kecil dan Kecil – Menengah”.

Adapun yang menjadi dasar hukum Program OK OCE adalah Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengembangan Kewirausahaan. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2018 ditingkatkan menjadi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu sebagai dasar hukum penggantian program OK OCE berganti menjadi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT).

Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan cara kolaboratif antara pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta,

dunia usaha, dan masyarakat. Adapun tujuan Program Kewirausahaan Terpadu (PKT), antara lain :

1. Mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan berwirausaha
2. Menciptakan lapangan pekerjaan baru
3. Menumbuh kembangkan potensi kewirausahaan di Provinsi DKI Jakarta
4. Mendorong dan memfasilitasi penciptaan wirausaha di masyarakat
5. Meningkatkan kualitas dan pendayagunaan sumber daya manusia sebagai wirausaha di daerah melalui pemanfaatan teknologi dan sumberdaya lokal agar memiliki keunggulan kompetitif bagi penguatan ekonomi daerah
6. Meningkatnya jumlah wirausaha yang mandiri, berkualitas, tangguh, dan handal
7. Mengembangkan dan meningkatkan jumlah serta skala usaha produktif baik yang dikelola perorangan maupun kelompok dalam bentuk koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil Menengah (IKM).
8. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil Menengah (IKM) dalam menopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
9. Mengarahkan kebijakan dan dukungan Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan untuk mewujudkan kewirausahaan terpadu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi *leading sector* dalam pelaksanaan dan terkait dengan 9 (sembilan) tujuan tersebut di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan yaitu pada Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

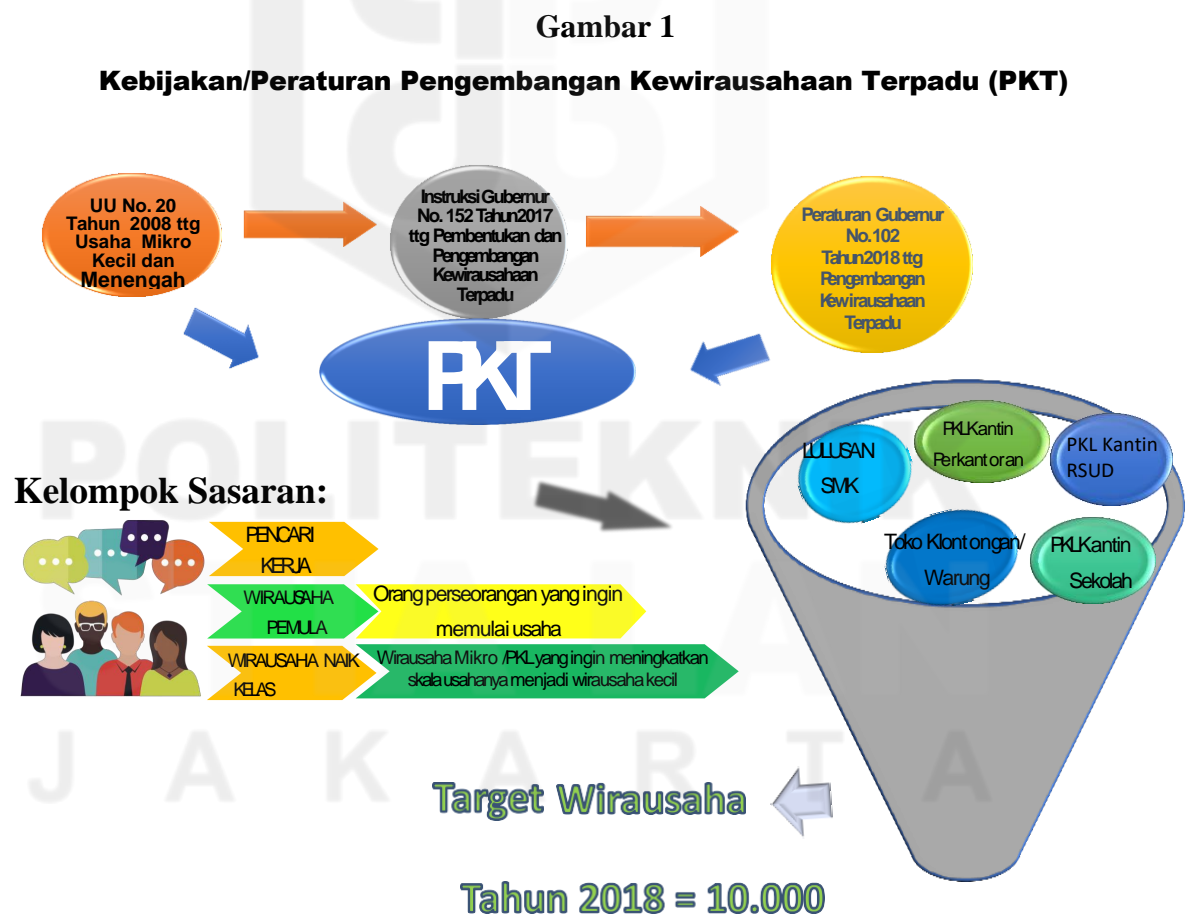
Selanjutnya pada setiap kecamatan Provinsi DKI Jakarta ditempatkan Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel) Usaha Kecil dan Menengah Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Adapun yang menjadi target dan kelompok sasaran Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), yaitu :

1. Pencari kerja yang diperuntukan bagi orang perseorangan atau kelompok orang yang membutuhkan dan belum mendapatkan pekerjaan. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 untuk mendapatkan pekerjaan sebanyak 200.000 orang.
2. Wirausaha pemula diperuntukan bagi orang perseorangan atau kelompok orang berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) dan berkebutuhan khusus yang ingin memulai usaha melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Target yang tertera pada Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) sampai dengan Tahun 2020 minimal mencapai sebanyak 200.000 wirausaha baru.
3. Wirausaha naik kelas merupakan wirausaha mikro termasuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ingin meningkatkan skala usahanya menjadi wirausaha kecil. Wirausaha kecil yang ingin meningkatkan skala usahanya menjadi wirausaha



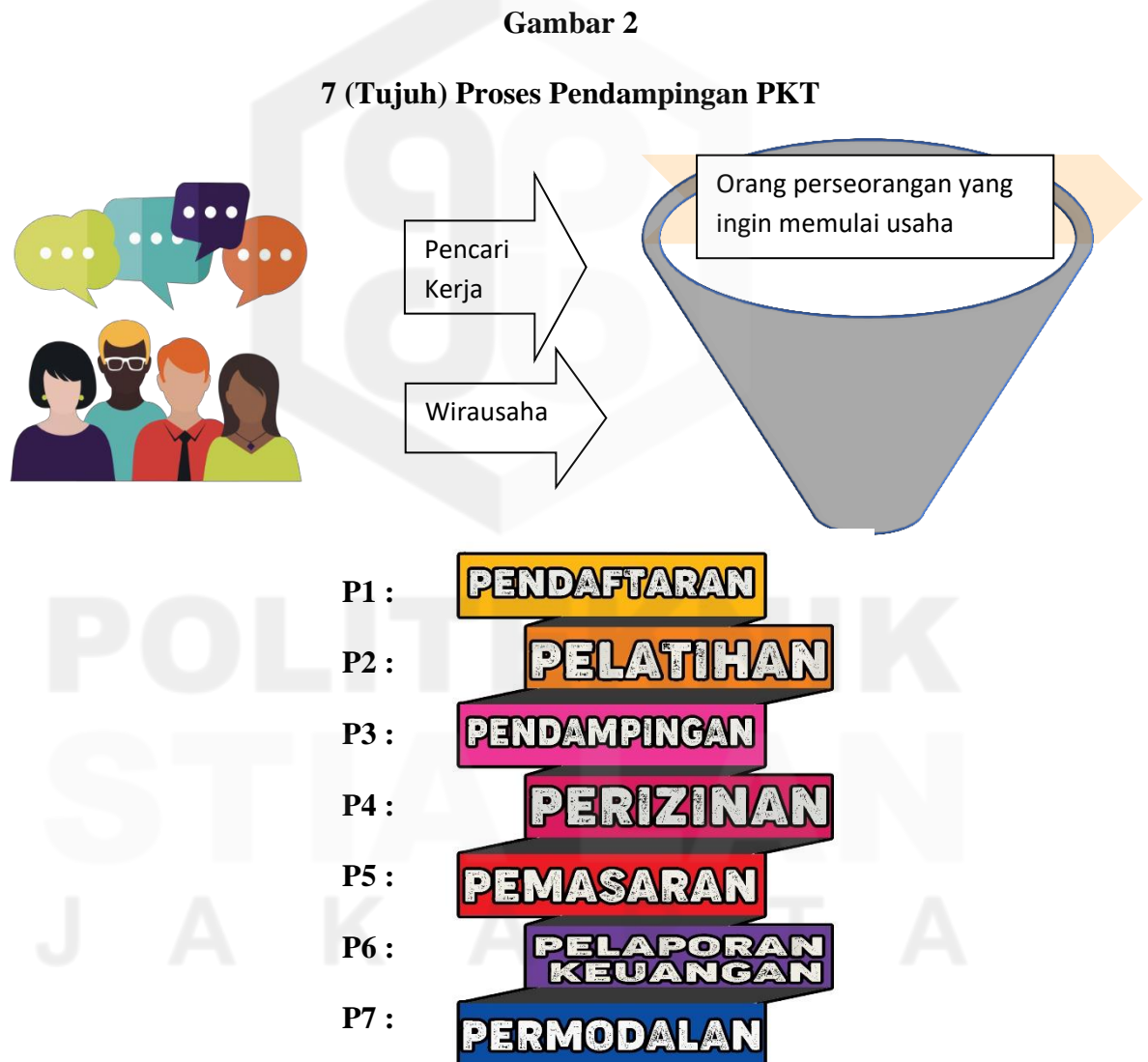
menengah, dan wirausaha menengah yang ingin meningkatkan skala usahanya menjadi wirausaha besar.

Terkait dengan kebijakan dan peraturan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), berikut disajikan alur kebijakan dan peraturan sebagaimana yang tertera pada Gambar 1 di bawah ini:



Sumber : Kasatpel Sudin KUKMP Kecamatan Setiabudi

Adapun terkait dengan alur proses pendampingan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dapat dijelaskan sebagaimana tersaji pada Gambar 2 seperti di bawah ini:



*Sumber : Satpel Sudin KUKMP Kecamatan Setiabudi*

Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, tepatnya di wilayah Kecamatan Setiabudi ditugaskan kepada Kepala Satuan Pelaksana (Kasatpel)

Usaha Kecil dan Menengah Kecamatan Setiabudi dalam pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Adapun dalam penyelenggarannya, terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dengan penyelenggara Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), yaitu :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, serta perdagangan.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang sosial
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT)

Selanjutnya sebagai data awal, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) telah diselenggarakan

oleh instansi-instansi terkait, berikut ini disajikan data jumlah kepeserataan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) sebagaimana tertuang pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Peserta Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT)**  
**Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan**  
**Tahun 2019**

NO	KELURAHAN	JUMLAH PESERTA			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	KET.
		NON JS	JS	JML								
1	SETIABUDI	21	2	23	23	5	1	0	0	0	0	
2	KARET	48	26	74	74	10	4	2	7	0	0	
3	KARET KUNINGAN	56	49	105	105	29	16	4	24	0	0	
4	KARET SEMANGGI	4	4	8	8	1	0	0	0	0	0	
5	KUNINGAN TIMUR	12	7	19	19	0	0	0	0	0	0	
6	GUNTUR	16	6	22	22	6	0	0	1	0	0	
7	PASAR MANGGIS	72	29	101	101	25	10	0	10	0	0	
8	MENTENG ATAS	79	15	94	94	21	10	4	15	0	0	
	JUMLAH KESELURUHAN	308	138	446	446	97	54	10	57	0	0	

*Sumber : Data Kasatpel UKM Kecamatan Setiabudi*

Target peserta PKT untuk wilayah Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2019 sebanyak 800 orang, yang dimana peserta minimum sudah mengikuti langkah dari P1 sampai dengan P5, dengan rincian sebagai berikut :

1. Peserta yang sudah mendaftar sampai dengan 31 Juni 2019 sebanyak 446 orang terdiri dari sebanyak 308 Non JS (Non Lokasi Sementara) dan sebanyak 138 orang JS (Lokasi Sementara).
2. Target peserta yang sudah mengikuti P5 sebanyak 57 orang. Namun pada penerapannya peserta yang sudah mengikuti P5, belum semua mengikuti P4.

Hal tersebut dikarenakan masih ada peserta PKT yang belum mau mengurus perizinan usahanya, namun mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam promosi dan menjual produk usahanya. Berdasarkan pengamatan sementara pada pelaksanaan pendampingan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), ditemukan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Minat warga masih rendah untuk mengikuti program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) karena merasa sudah cukup untuk usaha yang telah dijalani.
2. Kurangnya sosialisasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dari pihak Kelurahan ke RT/RW, oleh karena itu banyak warga yang tidak mengetahui adanya program PKT.
3. Banyak warga yang mendaftar Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), semata mata hanya untuk meminta tempat usaha Lokasi sementara (Loksem), sedangkan untuk Loksem tersebut ada sebelum PKT yang juga binaan Sudin UKM dan Loksem tempatnya terbatas.
4. Kurang aktifnya peserta PKT yang telah mengikuti pelatihan untuk melanjutkan tahap selanjutnya, sehingga belum ada peserta yang dapat menyelesaikan tahapan dari P1 sampai dengan P7.

5. Minat warga atau para peserta PKT untuk mengikut bazar yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh pihak Kecamatan Setiabudi masih rendah, hal ini berdasarkan pengamatan bahwa peserta bazar adalah orang yang sama di setiap gelaran bazar Kecamatan Setiabudi.
6. Kondisi tata ruang sebagian besar wilayah Kecamatan Setiabudi adalah lingkungan perkantoran dan mayoritas penduduknya ber-KTP diluar Kecamatan Setiabudi, sehingga menyulitkan SKPD terkait untuk menjaring peserta PKT.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, dapat diketahui masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan atau implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT), dan mengingat bahwa program PKT yang merupakan lanjutan dari program OKE OCE adalah salah satu program unggulan atau janji kampanye yang sering digaungkan oleh pasangan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, maka menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam pembinaan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pada masyarakat di Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan. Selanjutnya penelitian ini akan dituangkan melalui judul penelitian **“Implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam Pembinaan Potensi Keterampilan dan Kemandirian Berusaha Pada Masyarakat di Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan”**.

## **B. Fokus Permasalahan**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimanakah Implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam Pembinaan Potensi Keterampilan dan Kemandirian Berusaha Pada Masyarakat di Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan ?”**

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam Pembinaan Potensi Keterampilan dan Kemandirian Berusaha Pada Masyarakat di Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Akademik**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya ilmu pembangunan daerah melalui dalam hal ini terkait dengan teori kebijakan dan implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam Pembinaan Potensi Keterampilan dan Kemandirian Berusaha Pada Masyarakat di Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.



## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dalam Pembinaan Potensi Keterampilan dan Kemandirian Berusaha Pada Masyarakat di Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.



POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam pembinaan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pada masyarakat di Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi berdasarkan temuan penelitian masih terdapat beberapa hal yang belum berjalan secara optimal. Adapun kesimpulan secara rinci dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Ditinjau berdasarkan Aspek Pencapaian Tujuan melalui Sub Aspek Proses Sesuai Prosedur dan Sub Aspek Dampak dan Manfaat Terhadap Peserta, maka dapat disimpulkan bahwa implementasinya secara umum sudah baik. Hal ini karena implementasi program tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pergub DKI Jakarta 102 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, dan program tersebut memberikan dampak dan manfaat yang positif kepada pesertanya sehingga dapat merubah para peserta ke arah yang lebih baik setelah mengikuti program tersebut. Namun ada beberapa hal yang belum terlaksana dengan optimal antara lain:
  - a) Tidak terdapat jadwal jelas seperti waktu, tempat dan lain-lain pada setiap tahapan P1 sampai dengan P7, setiap rangkaian kegiatan tahapan program PKT di Kecamatan Setiabudi berjalan begitu saja tanpa adanya

penjadwalan pada setiap tahapan-tahapan tersebut, sehingga sulit untuk mengukur capaian target program tersebut dan keikutsertaan para peserta menjadi tidak pasti.

- b) Jumlah keikutsertaan masyarakat semakin menurun pada setiap tahapannya, terlebih lagi baru ada 2 orang yang dapat menyelesaikan semua tahapan sampai dengan tahapan terakhir atau P7 yaitu mendapatkan bantuan permodalan dari lembaga keuangan perbankan.
- c) Tidak adanya kurikulum yang jelas yang menjadi acuan atau pedoman pemberian materi ajar atau kelas pelatihan tentang kewirausahaan. Para peserta menginginkan pemberian materi pengajaran yang lebih banyak praktek dibandingkan teori.
- d) Masih minimnya lembaga keuangan yang dapat diakses oleh peserta PKT untuk mendapatkan bantuan permodalan usaha dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan permodalan pun dirasakan masih rumit, tidak ada perlakuan khusus dari lembaga keuangan untuk para peserta PKT sehingga lebih dipermudah untuk mendapatkan bantuan permodalan tersebut.
- e) Masih minimnya akses dan sarana pemasaran yang diberikan oleh para penyelenggara kepada para peserta PKT di Kecamatan Setiabudi, sehingga para peserta PKT terutama para wirausahawan pemula mengalami kesulitan dalam memasarkan produk yang mereka buat.
- f) Masih banyak warga yang belum mengetahui informasi mengenai program ini akibat dari minimnya penyelenggaraan sosialisasi dari penyelenggara program PKT di Kecamatan Setiabudi.

- g) Para penyelenggara program PKT tidak memiliki tempat yang tetap dalam menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan terhadap peserta PKT, sehingga sulit untuk menentukan jadwal yang tetap terkait dengan program pelatihan dan pembinaan tersebut.
- 2) Ditinjau berdasarkan Aspek Tingkat *Implementability* melalui Sub Aspek *Content of Policy* dan Sub Aspek *Context of Policy*, maka dapat disimpulkan bahwa implementasinya secara umum sudah baik. Hal ini karena pada program tersebut sudah memiliki target sasaran yang jelas, sumberdaya pendukung yang memadai, dan kompetensi pelaksana yang baik. Namun pada program tersebut terdapat beberapa hal yang belum optimal antara lain:
- a) belum tersusunnya struktur kelembagaan atau susunan organisasi antar unit SKPD, sehingga menyebabkan munculnya ego sektoral, pembagian tugas menjadi tidak jelas, tumpang tindih pekerjaan dan tanggung jawab, serta persaingan mendapatkan peserta dalam rangka pencapaian target masing-masing unit SKPD.
  - b) Jumlah tenaga pendamping dirasakan belum memadai. Saat ini jumlah tenaga pendamping hanya berjumlah 4 orang, sementara wilayah yang harus didampinginya sebanyak 8 kelurahan. Idealnya jumlah tenaga pendamping 2 orang di setiap kelurahan, agar proses pendampingan yang merupakan tahapan yang cukup krusial dapat berjalan lebih optimal.

## B. SARAN

Untuk perbaikan implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) dalam pembinaan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha pada masyarakat di Kecamatan Setiabudi disarankan sebagai berikut:

1. Seksi Dinas KUKMP Kecamatan Setiabudi agar menyusun kurikulum pelatihan dan pembinaan yang lebih jelas, misalmya menambahkan pelatihan dan pembinaan yang difokuskan untuk meningkatkan motivasi dan mental para peserta PKT untuk menyelesaikan keseluruhan tahapan dalam program tersebut agar dapat menjadi wirausaha yang handal, serta memperbanyak porsi pelatihan dan pembinaan yang bersifat praktek dibandingkan dengan pelatihan yang bersifat teoritis.
2. Camat Setiabudi agar dapat membentuk susunan organisasi atau struktur kelembagaan Tim Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) Kecamatan Setiabudi sehingga akan menjadi lebih jelas tanggungjawab, pembagian tugas, koordinasi dan lain-lainya antar unit SKPD yang terkait dengan program ini.
3. Seksi Dinas KUKMP Kecamatan Setiabudi agar merubah sistem kepesertaan program dengan sistem gelombang atau angkatan, menyusun jadwal atau *rundown* setiap tahapan yang jelas agar memastikan keikursertaan para peserta dari tahap awal sampai akhir, dan memudahkan sebagai tolak ukur penilaian setiap lulusan peserta program PKT.
4. Seksi Dinas KUKMP Kecamatan Setiabudi mengusulkan kepada Suku Dinas KUKMP Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk menambah jumlah tenaga

pengajar dan pendamping agar lebih memadai, agar setiap kelurahan minimal memiliki 2 orang pendamping.

5. Seksi Dinas KUKMP Kecamatan Setiabudi mengusulkan kepada Dinas KUKMP Propinsi DKI Jakarta untuk memperbanyak akses dan sarana pemasaran produk para peserta PKT seperti memperbanyak program bazar, pasar warga, *popup market*, menambah area lokasi binaan dan lokasi sementara, dan mendirikan PKT Mart yaitu jaringan toko waralaba yang dapat menampung dan memasarkan produk-produk para peserta program PKT.
6. Seksi Dinas KUKMP Kecamatan Setiabudi mengusulkan kepada Dinas KUKMP Propinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan dan memperbanyak kerjasama dengan lembaga keuangan baik perbankan maupun non bank dan memberikan insentif kepada lembaga keuangan tersebut agar mau mempermudah persyaratan bantuan permodalan usaha khusus kepada para peserta PKT, agar peserta mendapatkan lebih banyak akses dan kemudahan dalam mendapatkan bantuan permodalan usaha.
7. Perangkat Pemerintah Kelurahan agar lebih meningkatkan sosialisasi program PKT di setiap masing-masing kelurahan, sehingga warga lebih mengetahui mengenai keunggulan program ini, sosialisasi bisa dilakukan pada pertemuan dengan warga, peremajaan RT dan RW, kunjungan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Alkhafaji, Abbas F., (2003), *Strategic Management Formulation, Implementation, and Control in a Dynamic Environment*, Newyork, The Haworth Press.s]
- Bakowatun, W. Wilhemus, (1994), *Manajemen*, Edisi Kelima, Jilid 1, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Chang, James F., (2006), *Business Process Management: Strategy and Implementation*, Newyork, Auerbach Publications.
- Drucker, Peter F., (2002), *Innovation And Entrepreneurship Practice and Principles*, New South Wales, HarperCollins Publishers (Australia) Pty. Ltd.
- Edwards III, G. C., (1980), *Implementing Public Policy*. Washington DC, Congressiona Quarterly.
- Grindle, Merilee S., (1980), *Politics and Policy Implementation in the Third World*, New Jersey, Princeton University Press.
- Grundy, Tony, (2001), *Strategy Implementation Through Project Management*, London, Thorogood.
- Handayani, Soewarno, (1985), *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani, (2003), *Manajemen*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta.
- Harjanto. (2011). *Implikasi Utama dalam Pembangunan Jakarta*. Jakarta.
- Huber, Adele J., (2011), *Effective Strategy Implementation Conceptualizing Firms' Strategy Implementation Capabilities and Assessing Their Impact on Firm Performance*, Hiedelber, Springer.
- Julnes, Patricia de Lancer, (2009), *Performance-Based Management Systems Effective Implementation and Maintenance*, Newyork, CRC Press Taylor & Francis Group.
- Kadarman, AM, et.al (2001), *Pengantar Ilmu Manajemen*, Jakarta, PT.Prenhallindo.
- Manullang, M., (2006), *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Martinez, Jorge et.al (2008), *Public Policy for regional Development*, Oxon, Routledge.
- Mukarom, Zaenal dan Laksana, Muhibudin Wijaya, (2015), *Manajemen Pelayanan Publik*, Bandung, CV. Pustaka Setia.
- Nurman. (2015). *Pembangunan Daerah Membentuk suatu Pola Kemitraan* . Jakarta.
- Paton, Robert A. & Mc.Calman, James, (2008), *Change Management A Guide to Effective Implementation Third Edition*, London, SAGE Publications Ltd.
- Pike, Andy et.all, (2006), *Local and Regional Development*, Oxon, Routledge.
- Syafiie, Inu Kencana. et.al., (1999), *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sugiyono, (2006), *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta.



Theresia , A. A., Nugraha, K. S., & Mardikanto, T. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung, CV. Alfabeta.

Verweire, Kurt & Van Den Berghe, Lutgart, (2004), *Integrated Performance Management A Guide to Strategy Implementation*, London, SAGE Publications.

Wanna, John, (2007), *Improving Implementation Organisational Change and Project Management*, Canberra, ANU E Press.

Wilson, Richard M.S. & Gilligan, Collin, (2005), *Strategic Marketing Management Planning, implementation and control Third edition*, Burlington, Elsevier Butterworth-Heinemann.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1998 Tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2001 Tentang Bidang/ jenis Usaha yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah Atau Besar Dengan Syarat Kemitraan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pemberdayaan Usaha Menengah

Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dan Program Bina Lingkungan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, renja SKPD, serta RKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, renja SKPD, serta RKPD

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang rencasna Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022.

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL

Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Tahapan dan Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/UKPD.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 102 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT)

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil yaitu Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat PUMK adalah orang perorangan atau badan usaha perorangan yang melakukan usaha mikro dan kecil di lokasi yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur No. 152 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pengembangan Kewirausahaan.

### C. JURNAL

Ama, Njoku O., (2013), Assessing Factors That Affect Women and Youth MicroEntrepreneurs in Botswana, *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 1(2), 306-332.

Gupta, Kamal & Kaul, Jatinder, (2014), A Study Of Financial Literacy Among Micro Entrepreneurs In District Kangra, *IMPACT: International Journal of Research in Business Management*, 2(2), 63-70.

Kamunge, Mbugua Stephen et.al, (2014), Factors Affecting the Performance of Small and Micro Enterprises in Limuru Town Market of Kiambu County, Kenya, *International Journal of Scientific and Research Publications*, 4(12), 2250-3153.

Rahman, Nurulhasanah A., Yacoob, Z & Radzi, R.M., (2014), Determinant Of Succesful Financial Management Among Micro Entrepreneur In Malaysia. *Journal of Asian Scientific Research*, 4(11), 631-639.

Santoso, Djoko., Indarti & Santoso, Aprih, (2017), Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) Menuju Kemandirian Melalui Pembinaan Kewirausahaan, Permodalan, dan Pemasaran di Kecamatan Tugu. *Journal.upgris.ac.id*. 8(2), 166-173.

Sucuahi, William T., (2013), Determinants Of Financial Literacy Of Micro Entrepreneurs In Davao City, *International Journal of Accounting Research*, 1(1), 44-51.